

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Disertasi ini adalah mengenai hubungan-hubungan kekuasaan dalam penguasaan dan pemanfaatan ruang publik. Lebih khusus hubungan kekuasaan itu dalam konteks penggunaan trotoar oleh Pedagang Kaki-Lima¹ (yang selanjutnya disingkat dengan PKL) di Depok. Hubungan-hubungan kekuasaan tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk-bentuk resistensi, negosiasi dan akomodasi.

Hubungan-hubungan kekuasaan itu terjadi, karena di antara para aktor (sebagai *agen*) ada kepentingan-kepentingan di antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Selama pengamatan di lapangan dalam waktu yang cukup lama saya mengamati, adanya gejala-gejala adanya praktik negosiasi dan akomodasi di antara para aktor. Hubungan-hubungan tersebut, dapat dilihat ketika para aktor melakukan negosiasi dan akomodasi antara PKL, preman dengan aparat. Di samping itu, hubungan-hubungan di atas terjadi karena adanya kebijakan yang bersifat sepihak, sehingga dari pihak PKL seringkali melakukan perlawanan-perlawanan sebagai wujud penolakan kebijakan itu.

Keputusan atas kebijakan yang dihasilkan selama ini, dirasakan belum dapat merespon secara baik terhadap tuntutan maupun kebutuhan PKL. Kebijakan yang dihasilkan tidak ubahnya seperti kebijakan yang menekankan pada aspek legal-administratif dan seolah-olah hanya pihak pemerintah yang mempunyai hak

¹ Secara teoritis istilah Pedagang Kaki-lima yang sering disingkat PKL merupakan peninggalan zaman penjajahan Inggris (An Nal, 1983: 30), diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dalam *feet* sama dengan kaki; kira-kira 31 centimeter lebih sedikit. Lebar trotoar waktu itu 5 kaki atau 1,5 meter. Pedagang yang berjualan di trotoar tersebut kemudian disebut Pedagang Kakilima. Sedangkan menurut Akhirudin (1982), bahwa pedagang kakilima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memnuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu di dalam masyarakat. Aktivasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang sangat strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pedagang kakilima ialah orang yang melakukan kegiatan usaha untuk maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen.

untuk membuat kebijakan tersebut tanpa melibatkan pihak PKL untuk menghasilkan suatu keputusan. Ketika kebijakan tersebut diimplementasikan munculah berbagai bentuk perlawanan (resistensi) dari kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya tidak dapat diakomodir. Salah satu reaksi dari para PKL, mereka seringkali melakukan protes terhadap kebijakan karena dianggap tidak memberi peluang usaha seperti yang terjadi pada PKL umumnya. Bentuk-bentuk penolakan itu merupakan bukti, bahwa kebijakan pemerintah yang seringkali bersifat sepihak dipandang membatasi usaha mereka. Berikut penjelasan singkat mengenai penolakan kalangan PKL seperti sering dimuat di berbagai media.

Banyak penggusuran di daerah lain dilakukan oleh petugas Satpol PP diiringi dengan protes dari pihak PKL, misal seperti yang terjadi di Pasar Minggu Jakarta Selatan, Sabtu (20 Agustus 2005, 18:59). Para PKL menolak dipindahkan ke tempat yang disediakan pemerintah, sehingga terlibat aksi ricuh dengan petugas (www.sctv.co.id/liputan6.com:07/09-05). Peristiwa sejenis terjadi di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta Pusat (Tempo:Senin 25/07-05).Ratusan PKL yang menamakan dirinya sebagai Pedagang Kaki-Lima Bersatu (PKLB) melakukan aksi demo dengan membawa spanduk, antara lain bertuliskan “*Cabut PERDA 11 tahun 1998, tolak penggusuran PKL*”, “*Kami bukan maling, koruptor, dan penjahat. Kenapa kami dikejar-kejar, ditangkap dan gerobak kami dihancurkan*”.

Kasus lain terjadi unjuk rasa (sekitar 200 PKL, Senin 13/06-05) datang ke gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki-lima Indonesia (PKLI) protes akibat aksi penggusuran oleh petugas Satpol PP setempat. Diantara para PKL membentangkan spanduk dan poster bertuliskan desakan kepada Pemerintah Kota DKI Jakarta untuk menghapus PERDA No.11/1998 tentang Ketertiban Umum.

Sumber lain mencatat, bahwa terjadi kerusuhan antara PKL dengan petugas Satgas GDN (Gerakan Disiplin Nasional) yang berakhir dengan amuk massa di kawasan perdagangan Cicadas Kota Madya Bandung (Selasa, 06/01-08). Kerusuhan itu merupakan buntut dari rasa ketidak-puasan mereka atas perlakuan Satgas GDN, yaitu membentak, mengusir secara paksa di sepanjang Cicadas

tersebut. Menurut keterangan yang berhasil dihimpun oleh Harian Media setempat, Pemerintah Daerah Kodya Bandung (10-97) memutuskan para PKL boleh beroperasi di atas pukul 18.00, tetapi mereka merasa tidak puas dengan keputusan itu. Adapun penolakan tersebut isinya, antara lain bahwa:”....*pada prinsipnya kita tahu pemkot punya niat baik. Tapi kalau hanya sekedar menggusur, kami menolak, bagaimanapun juga kami bergantung pada usaha itu*” demikian kata salah satu dari perwakilan PKL (iklan@detikinet.com). Masih banyak lagi kasus serupa yang intinya, mereka melakukan resistensi dengan penolakan-penolakan atas kebijakan pemerintah yang bersifat sepihak, sehingga berdampak pada masalah sosial lainnya yang sampai saat ini masih banyak dijumpai terutama yang terjadi di daerah perkotaan.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh para PKL sebagai pengguna ruang publik, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bagi penduduk di perkotaan. Dalam konteks penggunaan ruang publik serti yang terjadi di Kota Depok, pemerintah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penertiban Umum (TIBUM) telah melarang setiap aktivitas terkait dengan penggunaan tempat/ trotoar atau mereka yang berjualan di tepi jalan-jalan raya. Tetapi keberadaan para PKL masih tetap melakukan aktivitasnya di jalur tersebut, bahkan seolah-olah memiliki ‘kekebalan’. Bentuk-bentuk penolakan yang telah dilakukan selama ini, belum cukup untuk mengimbangi kekuasaan aparat, maka PKL melakukan strategi lain, yaitu dengan cara negosiasi² dan akomodasi agar tetap bisa menempati trotoar sebagai tempat aktivitas sehari-hari mereka.

² Istilah ini saya gunakan, untuk menyebut suatu pengertian yang berkaitan dengan posisi antara dua aktor (pelaku) yang saling melakukan ‘*tawar menawar*’ yang berarti ‘*saling mengetahui*’. Dalam bukunya Scott, (*Weapons of the weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, seri terjemahan, 2000 oleh A. Rahman Zainuddin, dkk), menggunakan istilah *negotiation* dengan pengertian *sembunyi-tau*, taktik ini digunakan oleh Scott untuk memulai pembicaraan tentang hal-hal yang bersifat peka, bahkan antara pihak-pihak yang saling berhubungan erat dan sering bertemu. Dalam konteks Trobriand, Malinowski (1929, seperti yang dikutip Koentjaraningrat, 1980: 168) menerangkan, bahwa berbagai macam sistem tukar menukar yang ada di masyarakat serupa itu merupakan daya pengikat dan daya gerak dari masyarakat. Sistem menyumbang untuk menimbulkan kewajiban membalas itu merupakan suatu dasar dan prinsip, yang mengaktifkan kehidupan masyarakat yang olehnya disebut prinsip timbal-balik (*principle of reciprocity*).

Pihak Pemerintah Kota Depok dalam menyikapi keberadaan PKL selama ini, tetap berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perda Nomor 14 Tahun 2006, tentang Ketertiban Umum. Sebagai bukti pelaksanaan peraturan itu, maka secara periodik melakukan operasi penertiban. Seperti yang pernah dilakukan pada hari Selasa 27 Oktober 2005, 4:30 dini hari yang dikoordinir langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Ka. Satpol PP) mengadakan penertiban terhadap PKL di sepanjang Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika. Kemudian dilaksanakan penertiban pada tanggal 2 Februari 2007 (Monitor Depok, 2007) yang mengerahkan 40 orang petugas Satpol PP Depok dan bekerja sama dengan pihak Garnisum Kodim 0508 Depok. Penertiban di dimulai dari Jalan Margonda, termasuk di depan Terminal Terpadu ke arah Balaikota.

Bertolak dari fenomena di atas, maka terdapat perbedaan pandangan antara kepentingan PKL dengan pihak aparat pemerintah kota, sehingga terjadi tarik menarik di antara keduanya. Perbedaan pandangan ini pada awalnya ditanggapi PKL dengan melakukan perlawanan-perlawanan, tetapi selanjutnya apabila perlakuan tersebut dianggap belum efektif maka mereka melakukan hubungan-hubungan negosiasi dan akomodasi. Hubungan-hubungan tersebut dilakukan bersama preman dan aparat setempat sebagai suatu strategi mempertahankan ruang publik (trotoar). Tindakan negosiasi, dan akomodasi dan terkait satu sama lainnya ini menjadi polemik yang berkepanjangan. Hubungan-hubungan kekuasaan³ yang

³ Sesuai dengan pendapat Foucault dalam Cheater (1999:3) yang menyatakan, bahwa individu-individu selalu dalam situasi mengalami dan melaksanakan kekuasaan secara simultan. Individu-individu bukan hanya target kekuasaan yang bergerak atau yang patuh saja, tetapi individu-individu juga selalu merupakan unsur pengungkapan kekuasaan, medium kekuasaan dan bukan merupakan titik-titik penerapan kekuasaan. Oleh karena itu secara inheren, di dalam hubungan sosial antara pelaku sebenarnya terdapat unsur-unsur persaingan, kompetisi, kontestasi, resistensi (perlawanan) dan juga adanya konsensus, negosiasi serta kerjasama. Dengan demikian, hipotesis yang mendasari konsepsi kekuasaan ini adalah hipotesis tentang bidang sosial yang berbeda tingkatnya di antara pusat-pusat kekuasaan yang dapat berubah-ubah (naik – turun). Ketidaksetaraan di antara kekuatan inilah yang menghasilkan kondisi kekuasaan, yang selalu lokal dan tak tetap (Patton 1987 : 234). Dalam konteks ini, kekuasaan bukan sesuatu yang dimiliki atau dipunyai oleh siapapun (Danaher, Schirato dan Webb 2000:70). Setiap orang, siapapun dia dapat memainkan kekuasaan dalam interaksi-interaksinya dengan pihak lain, sehingga tak pernah suatu hubungan kekuasaan tercipta sekali jadi, kemudian membeku seperti batu. Tetapi kekuasaan dapat mengalir sangat cepat dari satu tempat ke tempat lainnya tergantung pada perubahan aliansi dan keadaan.

terjadi selama ini terjalin, mengalir, menyatu, dan sekali-kali berpisah dalam satu bingkai yaitu motivasi ekonomi-politik, sehingga bekerjanya kekuasaan sangat tergantung pada situasi dan sekaligus kepentingan masing-masing para pelaku secara terus menerus.

Adanya penolakan-penolakan tersebut di atas, merupakan bukti bahwa pada umumnya masyarakat perkotaan dimana aturan-aturan hukum formal tidak berjalan sebagaimana mestinya, ada kecenderungan bagi para aktor memanfaatkan peluang-peluang untuk membangun hubungan-hubungan yang bersifat non-formal. Hubungan-hubungan non-formal yang dimaksud melalui negosiasi, akomodasi dan bahkan melalui berbagai bentuk perlawanan sebagai tindakan awal untuk merespon suatu kebijakan yang dianggap sepihak.

Pertumbuhan kota metropolitan seperti yang terjadi di Jakarta memberikan efek domino pada kota-kota sekitarnya. Pertambahan penduduk yang begitu cepat berakibat terjadi kepadatan terutama berpengaruh langsung terhadap penggunaan lahan baik sebagai ruang tempat tinggal maupun sebagai ruang aktivitas usaha penduduk di dalamnya. Akibat dari pertambahan penduduk tersebut, data terakhir menyebutkan bahwa Jakarta sudah mencapai titik optimal sehingga sebagian para migran untuk mencari lokasi di pinggiran Jakarta dan kota Depok menjadi salah satu pilihan mereka. Pendatang yang berstatus migran itu masuk sebagian memiliki *skill* tinggi dan sebagian lagi memiliki tingkat pendidikan rendah. Migran yang memiliki *skill* tinggi masuk pada sektor formal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan migran memiliki *skill* rendah masuk pada sektor informal seperti mereka yang berstatus sebagai pedagang kaki-lima yang selama ini dianggap belum memberikan tambahan *income* pada daerah tujuan, merusak estetika kota dan menimbulkan kemacetan kota.

Wilayah Depok yang dipilih sebagai *setting* penelitian ini, karena secara fisik pembangunan infra struktur telah banyak mengalami perkembangan. Pusat-pusat perbelanjaan telah dibangun seiring dengan pertumbuhan penduduknya, sehingga menuntut pemerintah menyediakan fasilitas perumahan. Fasilitas

prasarana jalan telah dilebarkan dan jalur-jalur hubungan antar kota melalui transportasi darat mengalami perkembangan sehingga mempermudah orang datang dan pergi untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Keberadaan perguruan tinggi, sekolah menengah, dan sekolah dasar yang telah dibangun di Kota Depok selama ini juga ikut mempengaruhi berbagai aktivitas penduduk setempat beralih dari usaha sampingan sebagai penyedia jasa kontrak rumah atau kos-kosan menjadi usaha utama yang cukup mendatangkan keuntungan. Pesatnya pembangunan di Depok tersebut di atas, memungkinkan orang melakukan hubungan-hubungan dalam konteks membuka usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu usaha yang saya maksudkan dalam kaitan kajian ini, adalah melalui usaha sebagai pedagang.

Keberadaan PKL di Depok dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlahnya telah mengalami penambahan, bersamaan dengan kota Jakarta sedang gencar melakukan penertiban dan penggusuran PKL. Sebagian dari mereka merupakan PKL pindahan dan pernah digusur dari wilayah Jakarta atau dari tempat lainnya, selain mereka yang telah lama menjadi PKL di daerah Depok. Perbedaan pengetahuan dan pengalaman dalam hal melakukan negosiasi dan akomodasi, bahkan ketika melakukan perlawanan-perlawanan di antara mereka sangat menarik untuk diketahui. Di antara PKL berasal dari berbagai latar belakang etnis yang berbeda serta memiliki alasan-alasan lain untuk menjadi PKL menjadi penting untuk diperhatikan. Bagaimana mereka melakukan pendekatan dengan aparat, ketika dilakukan penertiban dan bagaimana cara mereka melakukan negosiasi dengan preman akan menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam dengan pendekatan kualitatif. Di samping itu, adanya preman musiman dan preman yang memang sudah merupakan pekerjaan sehari-hari dimana masing-masing memiliki daerah kekuasaan yang belum tentu ada di daerah-daerah lain. Preman-preman tersebut memiliki cara-cara yang lain untuk melakukan pendekatan dengan aparat setempat dalam rangka ikut melibatkan diri bersama PKL, karena berbagai kepentingan.

Ada beberapa alasan, mengapa mengangkat tema kekuasaan dalam kajian ini?:

Pertama, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat yang terikat dalam suatu sistem yang dibatasi oleh norma-norma yang berlaku, sehingga setiap perilaku yang menyimpang dari norma-norma tersebut akan mendapat sanksi. Berbagai kebijakan melalui peraturan daerah tidak terlepas adanya kepentingan-kepentingan, sehingga kadang-kadang membuat orang sering melakukan tindakan di luar kewenangannya. Ketika banyak orang berfikir konstruktivisme, dimana manusia secara individu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Akibatnya mempengaruhi pemikiran manusia bergeser dari posisi objek menjadi subjek. Kemudian manusia dipandang sebagai makhluk yang bersifat aktif, kreatif, dinamis, dan konstruktif. Oleh karena itu, berbagai isu yang berkaitan dengan kekuasaan menjadi penting dikaji secara lebih mendalam.

Kedua, bahwa ketika bangsa ini masuk pada era reformasi dimana membawa dampak perubahan di segala aspek kehidupan. Termasuk dalam tatanan sistem pemerintahan mulai dari tata cara pemilihan RT sampai dengan pemilihan presiden telah mengalami banyak perubahan. Pada tatanan perguruan tinggi juga terjadi reformasi, baik mulai dari sistem penerimaan mahasiswa maupun sistem penerimaan pegawai baru telah mengalami perubahan. Hal ini terjadi di samping ingin memperbaharui sistem yang telah ada juga tidak terlepas adanya berbagai kepentingan. Meskipun motifnya berbeda-beda tetapi masih dalam kerangka yang sama yaitu ingin meraih sesuatu tujuan yang lebih baik. Ketika berbagai kepentingan dijadikan suatu tujuan utamanya dalam kehidupan ini, maka di sana terdapat isu kekuasaan yang perlu mendapat perhatian. Dalam kaitan ini memungkinkan orang melakukan hubungan-hubungan melalui usaha negosiasi, akomodasi dan resistensi, agar tetap bisa mendapatkan tujuan yang ingin dicapai.

Ketiga, mengapa yang dijadikan objek untuk mengungkap adanya hubungan-hubungan tersebut adalah PKL tidak yang lain, yang mungkin berkaitan dengan kehidupan ekonomi rumahtangga ?. Saya melihat keberadaan PKL di satu

sisi menjadi objek ‘pemerasan’ oleh pelaku-pelaku tertentu dengan motif ekonomi, tetapi justru keberadaannya sampai sekarang justru masih bertahan meskipun dalam situasi krisis. Di sisi yang lain PKL dianggap keberadaannya oleh pemerintah setempat secara ekonomis tidak ada keuntungan, tetapi oleh pihak-pihak tertentu ingin mempertahankannya karena justru di balik itu ada nilai ekonomi yang akan diperoleh. Sehingga memungkinkan adanya hubungan-hubungan antara para aktor melakukan berbagai upaya dalam penguasaan ruang publik di mana ada PKL.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian saya ingin melihat hubungan-hubungan antara PKL dengan preman dan aparat dalam konteks penguasaan ruang publik. Hubungan-hubungan yang dikonstruksi oleh pelaku-pelaku (sebagai *agency*⁴), menjadi penting diperhatikan karena ada motivasi-motivasi dan strategi-strategi tertentu yang hendak dikembangkan melalui negosiasi dan akomodasi.

1.2. Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini adalah mengenai hubungan-hubungan kekuasaan yang terjadi antara para pelaku sektor informal dengan preman, dan aparat pemerintahan setempat mengalami pasang surut sesuai dengan situasi yang berkembang di lapangan. Mereka menjalin hubungan tergantung pada waktu sebelum atau sesudah adanya operasi penertiban dengan melakukan tindakan resistensi, negosiasi dan akomodasi. Di samping itu, hubungan-hubungan tersebut terjadi untuk mengimbangi kebijakan pemerintah (*structure*⁵) yang selama ini oleh pihak pelaku sektor informal dianggap sepihak.

⁴ Giddens (1984), konsep agensi bermula dari konsep (‘aku’), dalam istilah Freud diidentifikasi sebagai *id*, *ego* dan *superego*. Aku tidak secara otomatis disebut *ego*. Tetapi, ia perlu mengambil ‘jalan memutar’ dalam kalangan strukturasi berdasarkan desentralisasi subjek. Untuk menjadi agensi ‘aku’ sebagai diri harus berkaitan dengan orang lain : dengan bidang tindakan, ruang dan waktu. Agensi dengan demikian merupakan subjek yang berproses. Hal yang paling penting dalam proses adalah kesadaran.

⁵ Struktur sebagai suatu yang eksternal – di luar diri manusia yang mengatur dan menentukan. Hubungan di dalamnya bersifat mekanis (baku) dan mempunyai sistem tersendiri. Dalam struktur terdapat sumberdaya dan aturan (norma) yang menentukan dinamika dan keberlangsungan sebuah struktur (Giddens, 1984). Bagi Giddens melihat struktur tidak dengan cara semacam itu. Sumberdaya dan aturan yang digunakan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial. Menurutnya, struktur merupakan alat reproduksi sistem dualitas struktur seperti menjelaskan

Sikap melawan, bernegosiasi dan sekali-kali akomodatif dilakukan antara para PKL, Preman dan Aparat yang selama ini terjadi, karena adanya pemberlakuan kebijakan yang sejak tahun 2006 tidak dapat mengakodir kepentingan pelaku sektor informal yang langsung terkena imbasnya. Kebijakan yang menyangkut penertiban umum diberlakukan terhadap sektor informal, karena pemerintah Kota Depok memandang perlu adanya penertiban di sektor tersebut. Terutama terkait dengan penggunaan trotoar yang selama ini digunakan untuk berdagang. Oleh karena itu, prioritas utama atas pemberlakuan kebijakan itu adalah para PKL yang menempati trotoar sebagai tempat usaha mereka.

Peraturan Daerah No: 14 Tahun 2006 mengatur penertiban umum, pada beberapa pasalnya melarang setiap aktivitas yang menempati trotoar sebagai tempat usaha. Artinya, bahwa setiap orang yang hendak beraktivitas dalam bentuk usaha apapun, dilarang menempati trotoar karena selain sebagai jalur hijau juga untuk menjaga keindahan kota. Pemberlakuan kebijakan tersebut, maka para pelaku sektor informal merasa dirugikan karena usahanya selama ini tidak diperkenankan untuk dilanjutkan. Akibatnya, aparat (petugas Satpol PP) ketika melaksanakan operasi penertiban sering terjadi perlawanan-perlawanan yang berujung bentrokan secara massal. Resistensi yang selama ini terjadi antara pihak Aparat dengan kalangan pelaku sektor informal, merupakan suatu tindakan yang bersifat sementara untuk mengimbangi perlakuan Aparat yang dinilai kurang manusiawi tersebut.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa suatu kebijakan jika tidak bisa dilaksanakan sebagaimana semestinya, maka pelaku-pelaku di luar sistem pemerintahan cenderung melakukan hubungan-hubungan secara non-formal, dengan membangun jaringan-jaringan dalam bentuk negosiasi dan akomodasi. Hubungan-hubungan non-formal itu terjadi, karena kedua belah pihak saling

konsep agen (subjek yang berproses), Giddens berpandangan bahwa struktur juga berproses. Kondisi inilah yang memungkinkan terciptanya dualias struktur.

interaksi⁶ satu sama lain, di mana di balik itu ada kepentingan-kepentingan yang terkait dengan penguasaan ruang publik. Untuk mengoperasionalkan masalah penelitian ini, maka saya mengidentifikasi masalah penelitian tersebut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut :

- Bagaimanakah kalangan PKL memaknai ruang publik sebagai *resources*, sehingga mereka dapat bertahan dalam usahanya menguasai ruang publik tersebut ?
- Bagaimanakah cara-cara PKL bersama Preman dan Aparat dalam menguasai ruang publik, sehingga penerapan kebijakan yang bersifat mengikat dan ketika di lapangan menjadi longgar melalui negosiasi dan akomodasi ?
- Bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan dilakukan PKL, Preman dan aparat terjadi selama ini, sehingga tindakan resistensi, negosiasi dan akomodasi dapat berlangsung dalam konteks penguasaan ruang publik ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini membahas berbagai permasalahan yang timbul dari fenomena PKL, dengan argumentasi bahwa hubungan-hubungan kekuasaan yang dikonstruksi oleh berbagai pihak dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang realitas yang terjadi lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- memberikan gambaran secara *detail* mengenai hubungan-hubungan kekuasaan yang dikonstruksi antara PKL dengan para pelaku yang ikut berperan (sebagai *agensi*) dalam mengakses ruang publik, berikut jaringan-jaringannya.

⁶ Menurut Giddens (1984), interaksi berupa (mencari makna atau signifikasi), kekuasaan (hubungan dominasi), dan sanksi (hubungan legitimasi). Tiap hari aktor akan berinteraksi dengan struktur.

- memahami berbagai hal yang berkaitan dengan *agensi-struktur-tindakan*, antara PKL dengan pihak-pihak yang terlibat secara kolektif untuk membangun jaringan-jaringannya.
- memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai peran Pemerintah Kota Depok dalam kaitan pelaksanaan Perda Nomor 14, tahun 2006 tentang penertiban umum, yang berdampak terhadap kehidupan para PKL. Hal ini perlu diketahui, karena kebijakan yang dilaksanakan selama ini cenderung bersifat sepihak sehingga seringkali terjadi penolakan secara kolektif dari para PKL.
- membangun konsep-konsep yang terkait dengan hubungan-hubungan kekuasaan antara PKL dengan para pelaku lainnya, sehingga diharapkan penelitian ini dapat mengungkap ruang dialektika yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian secara lebih mendalam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat:

- memberikan manfaat pada khasanah pengembangan hubungan konsep-konsep dalam ilmu Antropologi khususnya untuk memperkaya rekonstruksi teori Antropologi melalui upaya memahami fenomena perilaku manusia dalam suatu aktivitas tertentu. Secara lebih khusus studi mengenai hubungan-hubungan kekuasaan dalam upaya mengembangkan disiplin ilmu Antropologi Kekuasaan.
- memberikan masukan dalam rangka pengembangan studi mengenai hubungan-hubungan kekuasaan dalam konteks penguasaan ruang publik, dan juga diharapkan dapat menjadi acuan secara konseptual dalam upaya meninjau kembali kebijakan pemerintah kota setempat.

1.4. Tinjauan Pustaka : Kerangka Teori dan Konsep – Konsep Dasar

Hampir seluruh ahli ilmu sosial secara konvensional memakai konsep kekuasaan (*power*) tradisional. Kekuasaan secara tradisional difahami sebagai kemampuan mempengaruhi orang atau pihak lain untuk mengikuti kehendak si pemilik kekuasaan atau, daya pikat atau pengaruh yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya pada yang lain, dimana kekuasaan dipandang kemampuan seseorang yang bersifat represif, koersif dan opresif (Kotter, 1977). Tetapi, dalam kajian ini memahami konsep kekuasaan dari sisi yang lain dan lebih kompleks dan tidak sederhana seperti di atas.

Dalam teori strukturasi, konsep kekuasaan bukanlah gejala yang terkait dengan struktur ataupun sistem, melainkan kapasitas yang melekat pada pelaku. Karena itu, kekuasaan selalu menyangkut kapasitas transformatif (Giddens, 1979). Sebagaimana tidak ada struktur tanpa pelaku, begitu pula tidak ada struktur dominasi tanpa relasi kekuasaan yang berlangsung di antara pelaku yang konkret (misalnya atasan dan bawahan, majikan dan buruh, antara tuan tanah dan buruh tani, atau kombinasi dari semua itu).

Penguasaan terjadi lewat mobilitas struktur dominasi. Seperti sudah disebut, bahwa ada dua sumberdaya yang membentuk skema dominasi, yaitu penguasaan alokasi atas barang (ekonomi) dan penguasaan otoritas atas orang (politik). "Kekuasaan.....terbentuk dalam dan melalui reproduksi (dua) struktur dominasi" ini. Oleh karena kekuasaan merupakan kapasitas yang inheren pada pelaku, maka tidak pernah mungkin terjadi penguasaan total atas orang lain. Giddens menamakan gejala ini sebagai dialektika kontrol (*the dialectic of control*). artinya, bahwa dalam kekuasaan selalu terlibat relasi otonomi dan ketergantungan, baik pada tataran yang menguasai maupun yang dikuasai, dan bekerja saling mengontrol.

Bertitik tolak adanya para pelaku yang saling mengontrol tersebut, maka menurut Giddens (1984), bahwa konsep kekuasaan menjadi berbeda dengan konsep dominasi. Konsep dominasi lebih menekankan pada skema asimetri hubungan pada tataran struktur, terutama mencakup skema penguasaan atas orang dan barang seperti yang telah dijelaskan di atas.

Adapun kekuasaan menyangkut kapasitas yang terlibat dalam hubungan sosial pada tataran pelaku (interaksi dan pratek sosial). Dengan kata lain, bekerjanya kekuasaan tidak dilihat dari otoritas penguasaan akses politik dan ekonomi yang dimiliki oleh salah satu pelaku terhadap pelaku yang lainnya. Tetapi, kekuasaan bekerja dalam praktik–praktik sosial sejumlah pelaku dalam mereproduksi dua struktur (ekonomi–politik) seperti yang dimaksud di atas.

Dalam teorinya, Giddens (1984, seperti yang dikutip, Chris Barker, 2000: 185) terpusat pada cara agen memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui tindakan mereka sendiri. Aktivitas manusia yang teratur tidak diwujudkan oleh aktor individu semacam itu, melainkan terus-menerus dicipta ulang oleh mereka melalui cara mengekspresikan diri sebagai aktor. Jadi di dalam dan melalui aktivitas agen mereproduksi sejumlah kondisi yang memungkinkan aktivitas-aktivitas semacam itu. Sebagai contoh, setelah dibentuk sebagai laki-laki atau perempuan oleh sejumlah harapan dan praktik yang digenderkan, setelah belajar menjadi ayah atau ibu, maka kita bertindak sesuai dengan aturan-aturan itu, memproduksi aturan itu lagi. Dalam hal ini, Giddens menunjukkan bagaimana orang bisa saja menjadi agen aktif dan banyak tahu dan dia bisa saja dibangun oleh dan mereproduksi struktur sosial, misalnya kelas, gender dan etnisitas seperti contoh di atas.

Adanya dualitas, yaitu struktur dan pelaku dalam proses yang menempatkan struktur sosial merupakan hasil (*outcome*) dan sekaligus sarana sebagai medium praktik sosial, sehingga prinsip dualitas inilah yang membangun teori strukturasi (lihat juga Giddens, 1976), yaitu dalam hal melihat agensi dan struktur. Jadi, mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya: agensi terandaikan dalam struktur, dan struktur terlibat dalam agensi. Oleh karena itu, Giddens menolak melihat struktur sekadar sebagai sesuatu yang menghambat, tetapi justru melihat struktur dengan sesuatu yang menghambat dan sekaligus mendorong. Kemudian posisi ruang dan waktu merupakan pusat (*poros*) yang menggerakkan teori strukturasi. Ruang dan waktu menurut Giddens selanjutnya bukanlah merupakan arena atau

panggung tindakan, melainkan unsur konstitusi tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Artinya, tanpa ruang dan waktu tidak ada tindakan, dan tanpa ruang dan waktu tidak akan terjadi peristiwa dan gejala dalam struktur sosial (Giddens, 1981).

Dalam mengungkap bekerjanya kekuasaan, saya dipengaruhi juga dengan kerangka berfikir Michael Foucault (1980) yang telah menyumbangkan satu perspektif yang sangat kompleks dalam membaca dan memahami kekuasaan. Bagi Foucault, kekuasaan itu menyebar dimana-mana (*power is omnipresent*), meresap dalam seluruh jalinan relasi-relasi sosial, kekuasaan tidak berpusat pada individu-individu melainkan bekerja, beroperasi dalam konstruksi pengetahuan, dalam perkembangan ilmu dan pendirian-pendirian lembaga. Artinya, kekuasaan menurut Foucault terdistribusi di semua relasi sosial dan tidak dapat direduksi menjadi bangun dan determinasi ekonomi pusat atau menjadi karakter legal atau yudisial (Foucault, 1980 seperti yang dikutip C. Barker, 2000: 83). Namun, kekuasaan membentuk kapiler terisolasi yang terjalin dalam jaringan seluruh tatanan sosial (C. Barker, 2000:83).

Sebagai konsekuensi pandangan di atas, maka kekuasaan tidak berpusat pada individu-individu atau negara. Kekuasaan menyebar melalui “seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, rayuan, paksaan dan larangan” (seperti yang dikutip Haryatmoko, 2002: 11). Dengan demikian, kekuasaan bukanlah sebuah represi. Secara tidak langsung, pandangan Foucault ini adalah kritik terhadap Hobbes dan Locke (bahwa kekuasaan dijalankan melalui kekerasan atau kontrak sosial), terhadap Marx dan Machiavelli (pertarungan kekuatan), dan terhadap Freud dan Reich (represi yang menekan), juga terhadap pandangan kekuasaan sebagai dominasi kelas dan manipulasi ideologi (Marx). Kekuasaan tidak *unlocalised* karena ia tidak bertumpu pada negara, partai politik, kepemimpinan, melainkan merupakan hubungan antar komunikasi, jaringan sosial, tatanan disiplin, meresap dan melekat pada setiap perbedaan dan kehendak individu dan kelompok. Kekuasaan itu beroperasi bukan dimiliki, kekuasaan itu strategi perkembangan sosial dibanding

sebagai alat kekuatan. Adalah menarik apa yang disebut Foucault sebagai “gugusan-gugusan kekuasaan lokal yang tersebar” (seperti yang dikutip Haryatmoko, 2002: 12) yaitu keluarga, pabrik, sekolah, rumah sakit, penjara, birokrasi dan sebagainya. Melalui “kaki tangan-kaki tangan inilah” kekuasaan itu melakukan reproduksi dan bekerja dalam setiap lapisan sosial.

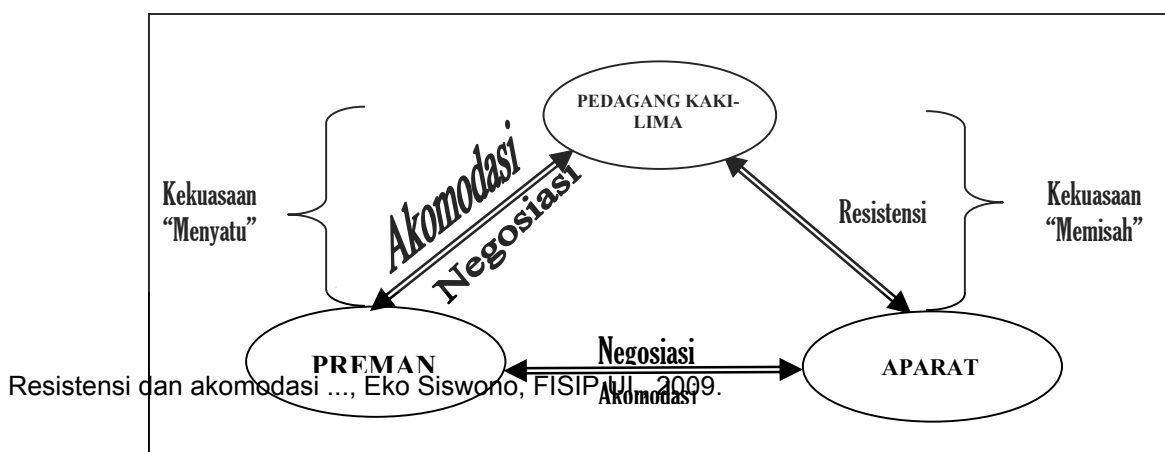
Menurut Foucault (1980, 132), bahwa kekuasaan terdistribusi dalam relasi-relasi sosial dan tidak dapat direduksi ke dalam bentuk-bentuk dan penentu-penentu ekonomi yang terpusat atau kepada karakter legalnya. Lebih jauh lagi, kekuasaan tidak semata represif, tetapi juga produktif dan kekuasaan memunculkan subjek-subjek. Kekuasaan berperan dalam melahirkan kekuatan (*force*), membuatnya tumbuh dan memberinya tatanan, kekuasaan bukan sesuatu yang selalu menghambat kekuatan, menundukkannya atau menghancurkannya (Foucault, 1980: 136).

Dalam kaitannya dengan berbagai konsep kekuasaan tersebut di atas dengan hubungan-hubungan kekuasaan seperti dalam kajian ini, maka perlu saya jelaskan terkaitannya seperti di bawah ini :

Menurut James S. C (seri terjemahan Iman Muttaqien, dkk, 2008: 98-99) menjelaskan, bahwa terdapat dua jenis situasi dalam kaitannya hubungan-hubungan kekuasaan, yaitu hubungan kekuasaan menyatu dan hubungan kekuasaan memisah. Lebih jauh dijelaskan, hubungan kekuasaan menyatu biasanya dijalin dengan penyerahan hak kontrol secara unilateral, sedangkan hubungan kekuasaan memisah hanya terjalin jika kompensasinya dibayarkan. Istilah “menyatu” dan “memisah” mengacu kepada hubungan antara kepentingan bawahan dan perintah atasan. Dalam hubungan kekuasaan menyatu perintah atasan mengimplementasikan kepentingan bawahan. Sedangkan hubungan kekuasaan memisah tidak demikian; kepentingan bawahan harus dipenuhi dengan sarana ekstrinsik. Hubungan kekuasaan terjalin dengan adanya penyerahan hal untuk mengontrol tindakan tertentu dari pelaku yang satu kepada pelaku yang lain. Oleh karena itu, untuk leih tepatnya, hanya hubungan kekuasaan individual yang bisa dijelaskan sebagai

ubungan menyatu atau memisah. Terlepas dari penerapan istilah “menyatu” dan “memisah” tidak hanya pada hubungan kekuasaan, namun juga pada struktur kekuasaan tetap ada gunanya untuk tujuan pemaparan terkait dengan kajian ini. Perbedaan antara hubungan kekuasaan menyatu dan memisah dilakukan tidak hanya karena ia berhubungan dengan bentuk-bentuk kekuasaan yang berbeda, tetapi karena perbedaan itu mengarah kepada berbedanya jenis perilaku dan, terutama kepada berbedanya jenis masalah untuk dua jenis hubungan kekuasaan tersebut.

Dalam konteks kajian ini, pada mulanya yang terjadi hubungan-hubungan antara PKL, dan Aparat adalah hubungan kekuasaan memisah, karena adanya kepentingan bawahan (dalam hal ini para PKL) yang harus dipenuhi dengan sarana secara ekstrinsik, yaitu tempat sebagai usaha (trotoar). Tetapi, dalam kenyataannya di lapangan tidak demikian. Oleh karena sarana yang secara ekstrinsik tidak dipenuhi oleh atasan (dalam hal ini Aparat /Satpol PP) karena secara struktur terikat dengan kebijakan, maka seringkali terjadi perlawanan-perlawanan dari pihak PKL. Tindakan tersebut dilakukan mereka untuk mengimbangi tindakan Aparat Satpol PP atas pelaksanaan kebijakan berupa peraturan daerah (Perda) tersebut. Perkembangan selanjutnya, para PKL bersama Preman setempat melakukan hubungan-hubungan melalui tindakan negosiasi dan akomodasi dengan Aparat. Hubungan-hubungan tersebut yang dilakukan tersebut cenderung ke arah hubungan kekuasaan menyatu karena ada kepentingan-kepentingan dari bawahan (dalam hal ini para Preman dan PKL) yaitu untuk menguasai ruang publik yang dimaknai sebagai trotoar itu. Untuk lebih jelasnya, bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan memisah dan menyatu dapat dilihat di bawah ini :



Berdasarkan pengamatan di lapangan yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama, saya melihat, bahwa adanya resistensi bekerja di tengah-tengah aktivitas pelaku tindakan sosial karena tidak ada titik temu antara struktur dan agensi dalam konteks hubungan kekuasaan memisah tersebut, karena dianggap bersifat sepihak. Dalam hal ini, jika para pelaku merasa tidak puas maka strategi lain yang dilakukan melalui negosiasi, dan akomodasi, dimana tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan alternatif. Namun, jika tindakan resistensi dianggap masih diperlukan, maka hal itu tetap dilakukan meskipun dengan cara sembunyi-sembunyi karena dianggap efektif. Kerja-sama antara PKL, Preman dengan Aparat atas dasar saling membutuhkan, dikemas dalam suatu kinerja yang sangat rapi dan terencana. Melihat gejala tersebut, maka dapat dipahami bahwa bekerjanya hubungan kekuasaan antara resistensi dengan negosiasi dan akomodasi saling bersinergi sesuai ruang dan waktu. Ketiganya bekerja mengalir, menyatu, dan kadang-kadang berpisah dalam suatu aktivitas sehari-hari menyesuaikan situasi dan kondisinya.

Terkait dengan resistensi dalam hubungan kekuasaan di atas, bekerja karena adanya tarik-menarik antara struktur dan subjek pelaku tindakan yang lazim disebut praktik-praktik sosial – saya mencoba merujuk pada pemikiran A. Giddens (1977, dan 1980) dan M. Foucault (1977 dan 1980), terutama menyangkut isu agensi-struktur dalam hubungannya dengan kekuasaan. Di samping itu, juga melihat bagaimana bekerjanya posisi-posisi subjek yang saling ketergantungan dan menandai proses pembentukan pengetahuan dan wacana. Kemudian dihubungkan dengan kajian ini, bahwa isu agensi-struktur

dalam hubungan-hubungan kekuasaan yang bekerja melalui resistensi, negosiasi dan akomodasi.

Menurut Giddens (1984) kontekstualitas, merupakan sejumlah interaksi yang disituasikan dalam ruang dan waktu. Lebih lanjut A. Giddens menyatakan, bahwa :

“..... kontekstualitas bukanlah ditentukan oleh tempat atau lokasi terjadinya interaksi, tetapi lebih ditandai oleh adanya ‘sarana–antara’ yang menciptakan interaksi tersebut. Sarana–antara tersebut meliputi interpretasi–interpretasi, fasilitas, dan norma–norma yang ‘memperantarai’ para pelaku dalam rangka melakukan tindakan. ...”.

Berdasarkan pernyataan di atas, Giddens memandang kekuasaan bukanlah fenomena yang berhubungan dengan struktur, melainkan dalam kapasitas yang melekat pada diri pelaku dan kekuasaan selalu menyangkut kapasitas transformatif. Hal ini berarti tidak ada struktur tanpa pelaku, juga tidak ada struktur dominasi tanpa hubungan kekuasaan yang berlangsung di antara para pelaku. Struktur dominasi atau penguasaan yang mencakup skema penguasaan otoritas penguasaan alokasi atas barang (ekonomi) dan atas orang (politik). Struktur dominasi setelah melalui ‘sarana–antara’ berupa fasilitas–fasilitas yang ada menghasilkan praktik dan tindakan sosial berupa kekuasaan. Dengan demikian, bekerjanya kekuasaan bagi Giddens dapat dipelajari dari cara pelaku memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui interaksi–interaksi antara mereka. Lalu interaksi–interaksi tersebut, menurut Giddens (1984), tidak mungkin terjadi penguasaan total atas pelaku tertentu terhadap pelaku lainnya, sehingga dalam kekuasaan selalu terlibat relasi otonomi dan ketergantungan, dan bekerja saling mengontrol.

Bertitik tolak adanya para pelaku yang saling mengontrol tersebut, maka menurut Giddens (1984), bahwa konsep kekuasaan menjadi berbeda dengan konsep dominasi. Dengan kata lain, bekerjanya kekuasaan tidak dilihat dari otoritas penguasaan akses politik dan ekonomi yang dimiliki oleh salah satu pelaku terhadap pelaku yang lainnya. Tetapi, kekuasaan bekerja dalam praktik–praktik sosial sejumlah pelaku dalam mereproduksi dua struktur (politik dan ekonomi) seperti dalam kajian ini.

Berkaitan dengan praktik-praktik sosial yang tercermin dalam fenomena keberadaan PKL dalam kajian ini, maka bekerjanya kekuasaan yang terjadi pada tataran pelaku yang diwujudkan melalui praktik-praktik resistensi, negosiasi, dan akomodasi. Juga tidak dilihat pada otoritas penguasaan dalam mengakses hubungan-hubungan ekonomi dan politik semata. Namun, kekuasaan tersebut bekerja terlihat pada hubungan praktik-praktik sosial dari sejumlah pelaku yang berusaha untuk mereproduksi struktur-struktur dalam tindakan dan agensi. Skema-skema yang direproduksi oleh para pelaku pada tataran struktur, tidak hanya mencakup skema-skema penguasaan orang dalam bentuk kebijakan, tetapi juga mencakup penguasaan barang dalam ruang publik yang sarat dengan struktur dan tindakan.

Selanjutnya, bagaimana pemikiran Giddens mengenai kekuasaan sesuai kajian ini ? Bahwa, strategi tindakan dimaknai sebagai skema-skema yang direproduksi oleh para pelaku pada tataran struktur yang digunakan untuk mengatur keberadaan agensi. Jadi bekerjanya kekuasaan yang terinternalisasi dalam suatu tindakan resistensi, akibat adanya ketidak-seimbangan struktur tersebut dalam mengatur agensi. Oleh karena itu, meskipun ada hubungan antara agensi dengan struktur, bukan berarti tidak bisa ditolak dalam praktiknya di masyarakat. Mengingat struktur terdapat di setiap kelompok masyarakat yang sifatnya mengikat, namun tidak berarti dalam praktiknya tidak mendapatkan menolakan, karena tidak terdapat keserasian dalam praktiknya. Apabila tindakan resistensi tersebut, sudah dianggap tidak mampu menembus kekuatan struktur, maka strategi yang tercermin dalam suatu skema-skema pengetahuan beralih pada tindakan sosial yang lain, yaitu melalui negosiasi dan akomodasi.

Untuk melihat bagaimana kekuasaan menurut pemikiran Foucault dalam kaitannya hubungan-hubungan kekuasaan yang bekerja dalam praktik-praktik sosial yang dilakukan oleh pelaku (*agensi*) sesuai kajian disertasi ini, diharapkan dapat memperjelas konsep yang dimaksud. Oleh karena itu, saya berusaha memadukannya dengan pemikiran A. Giddens, sehingga bekerjanya kekuasaan semakin nampak jelas dalam hubungan-hubungan antara

pelaku (sebagai *agen*) dengan pelaku lainnya dalam struktur–tindakan melalui resistensi, negosiasi, dan akomodasi. Oleh karenanya, saya mengawali mendiskusikan, konsep kekuasaan menurut pemikiran Foucault (1972, 1975, 1977, 1980, 2000 dan dalam Bertens 2001).

Bertolak dari pemikiran Foucault (1975), konsep kekuasaan bukan merupakan suatu benda yang bisa dimiliki, diberikan atau dipindah–tangkan. Tetapi kekuasaan merupakan suatu strategi yang kompleks sifatnya dalam masyarakat dengan mekanisme tertentu. Lebih lanjut Foucault menjelaskan, bahwa kekuasaan pada dasarnya dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup, dimana terdapat banyak posisi yang secara strategis berhubungan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran sesuai keadaannya. Awalnya, pelaku tindakan melakukan resistensi, tetapi jika tindakan tersebut kurang efektif maka pelaku mengalihkan tindakan tersebut melalui negosiasi dan akomodasi, namun masih dalam koridor hubungan–hubungan kekuasaan. Oleh karenanya, strategi berlangsung di mana–mana dalam ruang dan waktu. Ini berarti, bahwa strategi tersebut berlangsung pada sistem–sistem regulasi, aturan–aturan termasuk susunan, dan terdapat aktivitas manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga di situlah bekerjanya kekuasaan.

Pada tulisan Foucault yang dirujuk Bertens (2001) menyatakan, bahwa kekuasaan mempunyai berbagai bentuk dan penerapan dari bentuk–bentuk kekuasaan berbeda–beda berdasarkan *setting* masing–masing. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa kekuasaan terdapat juga pada sejumlah institusi dan struktur kekuasaan tidak dapat diartikan sebagai struktur yang menetap, namun mencair, menyatu dan sekali waktu berpisah. Ia justru senantiasa berubah sejalan dengan interaksi yang terjadi secara kontinyu – baik berupa perjuangan, perebutan, maupun persaingan – serta berkembangnya cara berfikir dan perilaku pada pelaku (aktor). Oleh karenanya, kekuasaan pada dasarnya selalu dinamis dan menyebar tanpa bisa dilokalisasi, serta meresap dalam seluruh jalinan hubungan sosial (Foucault, 1980).

Konsep Foucault tentang kekuasaan penting dalam disertasi ini, karena beranjak pada konsep kekuasaan terkait adanya struktur berupa kebijakan-kebijakan yang ditujukan pada *agensi* yang direpresentasikan oleh kelompok PKL, sehingga menjadi sangat mungkin untuk melihat hubungan-hubungan kekuasaan baik antara struktur-agensi maupun antara agensi-tindakan. Dengan kata lain, konsep kekuasaan bekerja akan terlihat tidak hanya pada hubungan-hubungan antara pemerintah dengan para pihak yang ikut memperkuat keberadaan PKL, tetapi juga terlihat pada hubungan-hubungan antar-individu dan kelompok PKL. Di samping itu, perkembangan keberadaan para aktor (PKL) akan dipengaruhi oleh kehadiran pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat semakin memperkuat keberadaannya sebagai *agensi*. Jenis hubungan-hubungan kekuasaan yang dijalankan dalam struktur (berupa kebijakan) selama ini akan dapat mempengaruhi strategi-strategi kekuasaan yang dijalankan oleh para pelaku sektor informal sebagai *agensi*, baik menyangkut strategi resistensi, maupun negosiasi dan akomodasi.

Selanjutnya, konsep kekuasaan menurut Foucault tidak dapat dilepaskan dengan konsep pengetahuan, karena manusia ketika melakukan interaksi dengan yang lain akan selalu mengonstruksi, mendekonstruksi, dan merekonstruksi pengetahuannya (Foucault, 2000). Pengetahuan tersebut, lebih lanjut Foucault menyatakan, berasal dari relasi – relasi kekuasaan yang menandai keberadaan subjek (1980). Oleh karenanya, kekuasaan dan pengetahuan merupakan dua sisi yang bekerja dalam suatu proses yang sama.

Selain membentuk pengetahuan, kekuasaan juga memproduksi wacana, dan wacana itu sendiri mengacu pada produksi pengetahuan melalui bahasa yang dapat memberi makna pada benda-benda (material) dan praktik-praktik sosial. Wacana dapat dipahami sebagai suatu penjelasan, narasi-narasi, pengklasifikasian dan sistem-sistem abstrak pemikiran. Wacana menyediakan cara-cara memperbincangkan sesuatu topik tertentu, baik berhubungan dengan idea-idea, praktik-praktik, ataupun bentuk-bentuk pengetahuan yang diulang-ulang pada suatu wilayah aktivitas tertentu. Topik atau objek baik berhubungan dengan idea,

praktik–praktik, maupun objek–objek tersebut diperbincangkan tidak harus pada tempat atau lokasi yang sama, tetapi ia bisa terjadi pada lintas lokasi sehingga tergantung pada *setting* sebagai objek yang dikehendaki. Di sini timbullah konsep ‘formasi diskursif’, yakni suatu pola peristiwa–peristiwa diskursif yang mengacu pada suatu objek pada sejumlah wilayah. Formasi diskursif menurut Foucault (1980) merupakan peta–peta makna yang telah diregulasi.

Lebih jauh Foucault (1980) menyatakan, bahwa strategi yang bekerja tidak melalui suatu penindasan dan represi, tetapi ia bekerja melalui normalisasi dan regulasi. Normalisasi dimaknai penyesuaian dengan norma–norma yang ada, sedangkan regulasi dimaknai sebagai pelaku–pelaku yang membuat aturan–aturan. Normalisasi dan regulasi tersebut bekerja pada tataran kehidupan manusia atau masyarakat tertentu yang berfungsi sebagai alat menyaring atau mesin kontrol (Foucault, 1977). Kemudian, alat tersebut dapat memproduksi individu–individu yang patuh, bisa menjadi subjek, dan digunakan, diubah, serta diperbaiki. Alat tersebut oleh individu dapat digunakan untuk mengubah dirinya menjadi subjek. Untuk dapat mewujudkan normalisasi tersebut perlu dikembangkan suatu sistem kontrol yang sangat kompleks. Pada konteks ini perhatian Foucault adalah subjektivitas yang terbentuk dari posisi–posisi subjek di dalam wacana. Artinya, subjek yang berbicara bukanlah pemilik pernyataan. Ia tergantung pada posisi–posisi diskursif yang ada, sehingga posisi–posisi bisa saja dimasuki oleh individu dari mana saja. Bertolak dari pernyataan tersebut, pada dasarnya Foucault telah menjelaskan bahwa tatanan sosial dibentuk oleh wacana–wacana kekuasaan yang kemudian melahirkan subjek–subjek, dan subjek–subjek tersebut membentuk dan mereproduksi tatanan itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa meskipun konsep–konsep Giddens, dan Foucault dalam merespons bekerjanya hubungan–hubungan kekuasaan dengan kacamata yang berbeda, tetapi pada titik–titik pemikiran tertentu keduanya saling bersentuhan. Giddens melihat bekerjanya hubungan–hubungan kekuasaan antara pelaku (sebagai *agen*) dengan pelaku lainnya dalam struktur–tindakan. Sedangkan Foucault melihat bekerjanya

hubungan–hubungan kekuasaan menyebar, mengalir dan kadang–kadang menyatu dalam kehidupan sosial. Giddens melihat hubungan kekuasaan tersebut bekerja melalui praktik–praktik sosial para pelaku (sebagai agensi), dan Foucault hubungan kekuasaan itu bekerja melalui proses pembentukan pengetahuan yang kemudian memproduksi wacana mengenai subjek tertentu. Secara garis besar, titik-titik persentuhan antara pemikiran Giddens, dan Foucault dapat diperhatikan penjelasan seperti, di bawah ini :

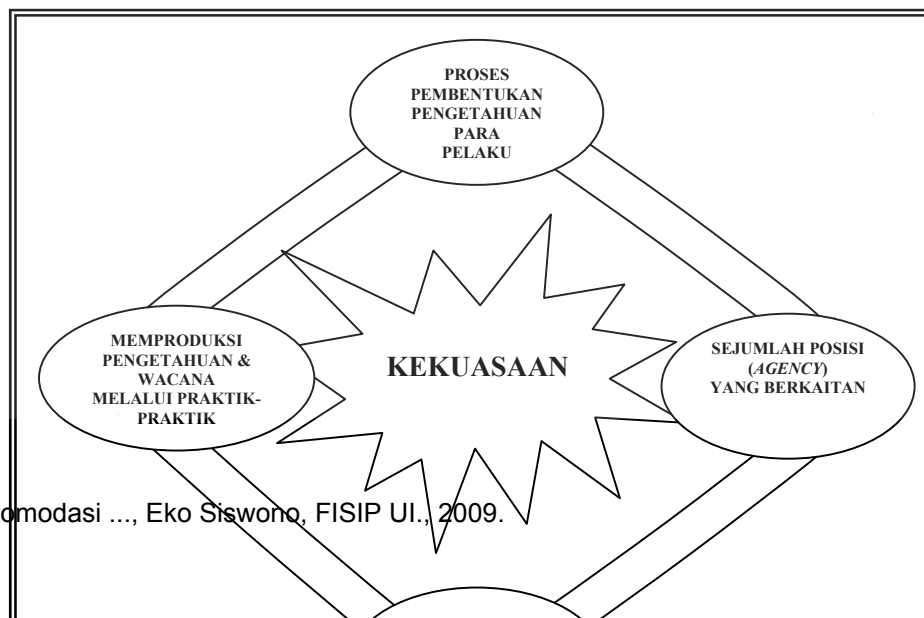
Pertama, baik Giddens, Foucault, melihat bekerjanya kekuasaan tidak mengacu pada sebuah sistem umum dominasi oleh kelompok terhadap kelompok lainnya. Ini artinya, bahwa kekuasaan bukan berasal dari sebuah otoritas yang dimiliki oleh individu atau institusi, tetapi kekuasaan bekerja berdasarkan relasi yang terorganisasi dalam suatu masyarakat. Kemudian dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup, dimana ada banyak posisi yang secara strategis saling berkaitan. Posisi-posisi tertentu secara strategis saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain, yaitu para pelaku (sebagai agensi) yang terlibat dalam suatu praktik-praktik sosial (Giddens). Sedangkan Foucault posisi-posisi strategis tersebut diterjemahkan sebagai sejumlah subjek yang merupakan hasil dari sebuah wacana atau pengetahuan yang dimiliki agensi. Jadi, baik Giddens, maupun Foucault mengakui, bahwa kekuasaan bukan sebuah benda yang bisa dimiliki atau dipindah-tangankan. Individu atau institusi tidak bisa memiliki kekuasaan, memindah-tangankan atau memberikan kepada orang lain atau institusi lainnya. Kekuasaan merupakan strategi yang kompleks dan bekerja dalam hubungan-hubungan tertentu di antara para pelaku yang terlibat.

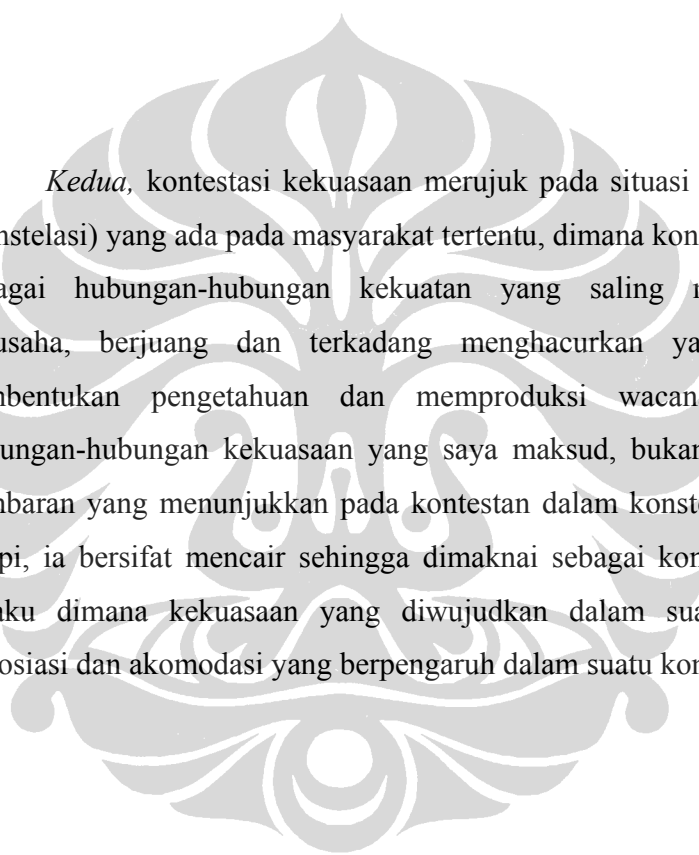
Kedua, bekerjanya kekuasaan tidak melalui penindasan dan represi, tetapi melalui penyesuaian dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi sebagai ‘filter’ atau alat penyaring dan berfungsi sebagai alat kontrol (pengawasan) dari masing-masing pelaku tindakan terhadap struktur yang telah ada. Jadi, Giddens memberikan istilah pengawasan (sebagai kontrol) tersebut sebagai ‘dialektika’, dan, sedangkan Foucault mengistilahkan sebagai ‘pendisiplinan’.

Ketiga, bekerjanya kekuasaan tidak sekadar menunjukkan *setting* dalam arti lokasi atau tempat terjadinya interaksi, tetapi *setting* dimaknai sebagai ‘sarana antara’ yang kemudian mampu mengakomodasi terjadinya interaksi-interaksi sosial (Giddens), dan bekerjanya kekuasaan tidak hanya terikat secara eksklusif pada satu tempat atau lokasi tertentu, tetapi secara dinamis ia mengalir lintas lokasi (Foucault).

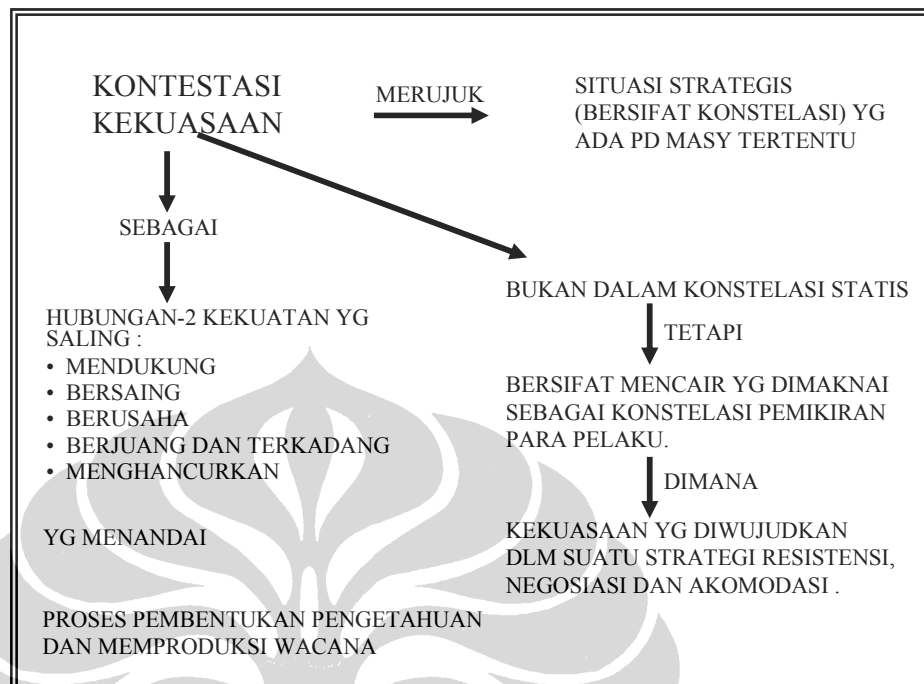
Seiring dengan titik-titik persentuhan dua pemikiran di atas, maka tiga point di atas membekali saya dalam rangka membuat kerangka acuan bekerja dalam kontestasi kekuasaan yang berpijak pada resistensi, negosiasi dan akomodasi terjadi pada PKL, preman dan aparat dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Kerangka acuan tersebut, secara metodologis telah membantu proses diskusi dalam rangka membangun teori dalam kajian disertasi ini. Kerangka acuan yang saya maksudkan adalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Pertama, kekuasaan yang bekerja dalam suatu hubungan-hubungan antar pelaku tindakan yang terjadi selama ini, saya pahami sebagai suatu proses pembentukan pengetahuan. Proses pembentukan pengetahuan tersebut, memproduksi suatu wacana (*diskursus*) yang bekerja melalui praktik-praktik sosial yang diwujudkan dalam tindakan resistensi, negosiasi dan akomodasi dalam suatu ruang lingkup tertentu. Dimana terdapat sejumlah posisi (sebagai *agency*) yang secara strategi saling berkaitan. Kekuasaan tersebut tersebar mengalir, menyatu, terpisah dan menyatu kembali melalui hubungan-hubungan sosial yang saling berkontestasi, sehingga tidak dapat direduksi ke dalam bentuk-bentuk dan penentu yang terpusat.

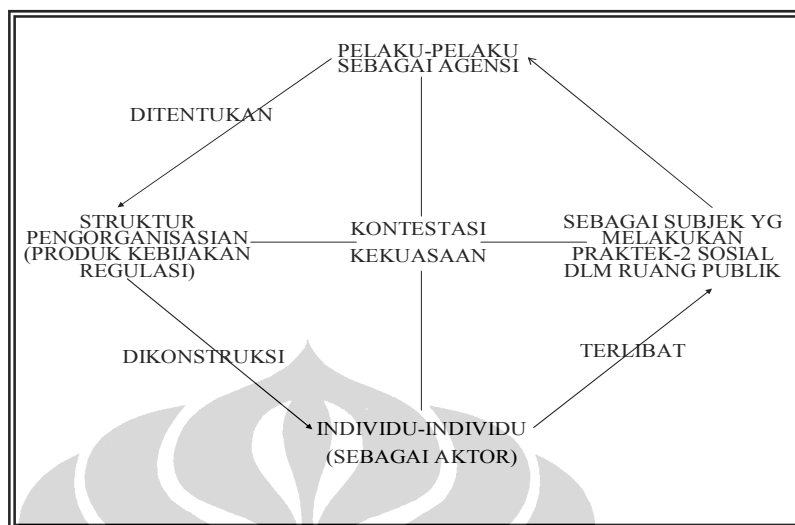




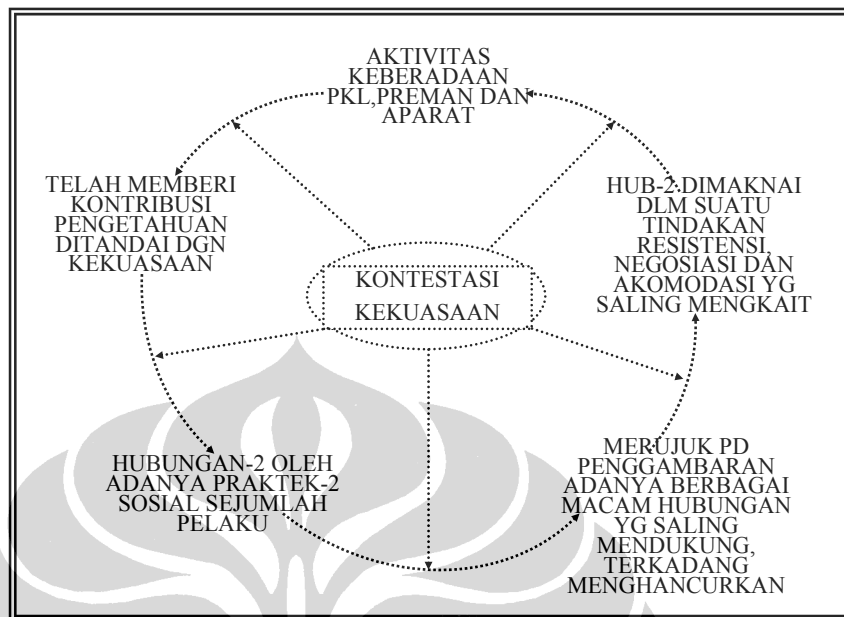
Kedua, kontestasi kekuasaan merujuk pada situasi strategis bersifat rumit (konstelasi) yang ada pada masyarakat tertentu, dimana kontestasi saya maksudkan sebagai hubungan-hubungan kekuatan yang saling mendukung, bersaing, berusaha, berjuang dan terkadang menghancurkan yang menandai proses pembentukan pengetahuan dan memproduksi wacana. Kontestasi dalam hubungan-hubungan kekuasaan yang saya maksud, bukan dilihat sebagai suatu gambaran yang menunjukkan pada kontestan dalam konstelasi yang statis. Akan tetapi, ia bersifat mencair sehingga dimaknai sebagai kontestasi pemikiran para pelaku dimana kekuasaan yang diwujudkan dalam suatu strategi resistensi, negosiasi dan akomodasi yang berpengaruh dalam suatu konteks.



Ketiga, posisi-posisi para pelaku (sebagai *agency*) dalam kontestasi kekuasaan pada dasarnya sebagai subjek yang melakukan praktik-praktik sosial dalam ruang publik. Mereka ditentukan oleh suatu struktur pengorganisasi tertentu, yaitu produk kebijakan regulasi. Pelaku-pelaku tersebut merujuk pada identitas-identitas yang telah diorganisasi dan dikonstruksi secara sosial menjadi individu-individu (sebagai aktor-aktor) yang secara kongkret terlibat dalam suatu aktivitas arus tindakan dan peristiwa dalam pertentangan ruang dan waktu.



Keempat, aktivitas keberadaan PKL, preman, dan aparat pemerintah Kota Depok telah memberi kontribusi dalam pembentukan pengetahuan yang ditandai dengan bekerjanya kekuasaan melalui hubungan-hubungan oleh adanya praktik-praktik sosial sejumlah pelaku yang saling berkontestasi. Kontestasi kekuasaan yang dilakukan PKL, preman, dan aparat pemerintah kota tersebut, pada dasarnya merujuk pada penggambaran adanya berbagai macam hubungan kekuatan yang saling mendukung, berjuang dan bersaing serta terkadang saling menghancurkan. Hubungan-hubungan yang dimaknai dalam suatu tindakan resistensi, negosiasi dan akomodasi secara strategis saling berkaitan dan bekerja karena saling membutuhkan.



Bertolak dari pemahaman di atas, maka dapat dijadikan tesis dalam kajian ini, sehingga bisa dilihat bagaimana bekerjanya kekuasaan dalam hubungan-hubungan antara PKL, preman dengan aparat. Tesis yang dimaksudkan antara lain sebagai berikut :

Pertama, bermula dari pengertian kekuasaan sebagai relasi atau hubungan-hubungan, maka kekuasaan dipahami sebagai sesuatu gambaran jalinan hubungan yang tidak tunggal, tidak utuh dan juga tidak homogen. Tetapi kekuasaan justru merupakan jalinan yang sangat kompleks di antara sejumlah interaksi dan peristiwa dalam praktik-praktik sosial, sehingga ia memosisikan sebagai suatu yang mencair, menyatu dan kadang-kadang terpisah yang kemudian menyatu kembali dalam koridor resistensi, negosiasi, dan akomodasi.

Kedua, kekuasaan yang bekerja dalam sejumlah interaksi antara pelaku dengan pelaku lainnya, tidak bisa direduksi dalam bentuk penentu yang terpusat. Artinya, bekerjanya kekuasaan dalam suatu praktik-praktik sosial oleh sejumlah pelaku tersebut tidak hanya ditentukan oleh dominasi atau otoritas salah satu pelaku terhadap pelaku lainnya. Tetapi, di antara pelaku ditandai oleh adanya struktur sebagai alat pengaturan yang bekerja secara produktif, saling mengontrol, saling membutuhkan, saling berusaha dan terkadang saling menghancurkan atau

melawan. Kebijakan publik yang mestinya sebagai pengontrol dan dibutuhkan oleh PKL, tetapi selama ini kebijakan tersebut justru tidak dapat mengakomodir kepentingan pihak PKL. Hal disebabkan karena pihak pemerintah (regulator yang sekaligus sebagai alat pengatur) menganggap keberadaan PKL dapat menimbulkan kemacetan, mengganggu keindahan kota, dan lain-lain. Akibatnya setiap kebijakan yang menyangkut penertiban umum termasuk di dalamnya mengatus keberadaan PKL, mengesampingkan kepentingan para PKL.

Ketiga, kekuasaan yang bekerja secara produktif dalam suatu koridor resistensi, negosiasi, dan akomodasi tersebut. Juga ditandai oleh konstruksi, dekonstruksi, rekonstruksi pengetahuan para pelaku tindakan yang diekspresikan dalam suatu tindakan yang memproduksi dalam skema-skema wacana, sehingga tidak terlihat secara nyata tetapi ada dalam suatu aktivitas diantara pelaku tindakan. Oleh sebab itu, akibat kebijakan yang tidak akomodatif tersebut menimbulkan perlawanan di lapangan ketika kebijakan tersebut diberlakukan.

Keempat, pada akhirnya dari sejumlah tesis tersebut di atas, itulah terlihat adanya konstelasi kekuasaan yang berlangsung secara terus menerus. Hal ini berlangsung sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing pelaku atas dasar kesepakatan bersama. Apabila konstelasi hubungan tersebut bisa terus dijalin, maka untuk selanjutnya menciptakan kontestasi kekuasaan tetapi masih koridor resistensi, negosiasi dan akomodasi.

1.5. Tulisan Terdahulu

Cukup banyak kajian yang sudah dilakukan penelitian oleh para ahli antropologi menyangkut persoalan sekitar sektor informal di perkotaan, terutama kajian-kajian yang dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya sektor informal dan bentuk-bentuk perlawanan di kalangan PKL. Kajian-kajian tersebut seperti yang pernah dilakukan oleh Hart (1971) dalam studinya di Ghana. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mampu menjelaskan, bahwa sektor informal terjadi

sebagai akibat adanya dialektika antara fenomena urbanisasi dengan industrialisasi di satu pihak, dan di pihak lain antara urbanisasi dengan fenomena pengangguran. Tetapi Hart sendiri belum membahas, bagaimana sektor informal itu terjadi dan bagaimana sektor informal tersebut melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah yang belum memihak masyarakat kalangan bawah, seperti yang pernah dilakukan oleh Alisjabana (2003) terhadap PKL di Surabaya.

Dalam penelitiannya, Alisjabana meskipun mampu menjelaskan bagaimana berbagai jenis perlawanan yang dilakukan oleh para PKL, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan selama ini. Namun, Alisjabana belum dapat menjelaskan mengenai bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan yang dibangun diantara para PKL dengan berbagai pelaku (aktor) lainnya yang ikut terlibat dalam mengakses ruang publik, sehingga mereka mereka mendapatkan semacam 'hak legitimasi' untuk dapat tetap bertahan hidup, melalui serangkaian resistensi. Disamping itu, baik temuan Hart maupun Alisjabana belum sama sekali mengungkap bagaimana para PKL melakukan negosiasi dan akomodasi dalam rangka memperoleh tempat (ruang publik) sebagai lokasi untuk berjualan mereka sehari-hari.

Berkaitan dengan faktor yang menyebabkan timbulnya sektor informal di perkotaan, studi Castells (1997) telah mampu menjelaskan tentang bagaimana terjadinya sektor informal di perkotaan yang tidak terlepas dengan adanya proses terjadinya industrialisasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah setempat. Akan tetapi, studi ini belum mengungkap bagaimana hubungan dari pihak pemerintah setempat dengan masyarakat yang belum dapat terserap di sektor formal atas kebijakan industrialisasi yang telah dibangun itu acapkali menimbulkan dampak terjadinya resistensi, negosiasi dan akomodasi seperti yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Begitu pula, Castells sama sekali tidak membahas bagaimana sektor informal membangun hubungan-hubungan kekuasaan dengan para pelaku lain dalam menyiasati pesatnya proses industrialisasi, sehingga mereka tetap bertahan meskipun dalam situasi krisis.

Untuk melihat berbagai upaya strategi dalam menyasati pesatnya proses industrialisasi, Ismail (1990) dalam studinya dapat menjelaskan dalam kasus sektor informal urban di Nairobi, Kenya. Dalam studinya, Ismail menyimpulkan bahwa keberadaan sektor informal harus dipahami sebagai realitas sosial ekonomi masyarakat urban. Kesempatan kerja di sektor formal yang terbatas, kesenjangan antara tenaga kerja terampil dengan yang tidak terampil sangat mencolok, penguasaan teknologi yang tidak memadai, dan minimnya sumberdaya menyebabkan menjamurnya pertumbuhan sektor informal di perkotaan. Namun demikian, Ismail belum dapat mengungkap, bagaimana para pelaku sektor informal melakukan hubungan-hubungan dengan para pelaku yang memiliki akses untuk menguasai ruang publik dalam rangka menarik perhatian calon konsumen dalam konteks penguasaan pasar. Kemudian, bagaimana para pelaku tersebut melakukan negosiasi, dan akomodasi dengan para pelaku lainnya untuk tetap bertahan pada ruang publik yang dinyatakan dilarang oleh pemerintah setempat seperti yang hendak diungkapkan dalam penelitian ini.

Fokus penelitian ini berbeda dengan studi yang pernah dilakukan oleh Sagir (1986). Meskipun dalam hasil penelitiannya, Sagir mampu melihat bahwa berkembangnya sektor informal tidak terlepas dari proses daya tarik perkotaan dimana masyarakat pedesaan mulai tidak lagi tertarik untuk bekerja di sektor pertanian, dan karena rendahnya daya tampung sektor pertanian di pedesaan. Akan tetapi Sagir, sama sekali belum menyentuh bagaimana pengaruh kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat khususnya sektor informal yang selalu dipinggirkan keberadaannya. Berbagai kemungkinan apa yang dilakukan pihak pelaku sektor informal dalam mengakses ruang publik yang melibatkan banyak aktor di dalamnya seperti yang hendak ditelaah dalam penelitian ini. Proses para PKL beserta pelaku lainnya dalam kaitannya dengan cara-cara untuk mendapat tempat berdagang lepas dari perhatiannya, padahal justru dengan melihat bagaimana cara mereka bernegosiasi, negosiasi dan akomodasi untuk dapat mengakses ruang publik tersebut menjadi menarik untuk diungkap. Oleh

karena itu penelitian ini hendak mengungkap masalah-masalah yang terkait dengan hal tersebut.

Kebijakan pemerintah yang selama ini selalu memihak pada tumbuhnya sektor formal yang kemudian ditanggapi dengan banyaknya sektor informal di perkotaan sebagai akibat rendahnya pendapatan di pedesaan, peningkatan jumlah pengangguran dan lambatnya pertumbuhan sektor formal, serta terbatasnya kesempatan kerja. Fenomena ini menjadi catatan penting oleh Manning, dkk (2001) dan Soto (1989) dalam penelitian ini mengenai sektor informal di perkotaan. Tetapi dalam studinya, Manning sama sekali belum menjelaskan tentang bagaimana terjadinya sektor informal yang selalu terpinggirkan itu atas kebijakan pemerintah kota dalam setahun terakhir sering menimbulkan konflik antara kalangan para PKL dengan petugas lapangan. Demikian pula, Soto (1989) yang telah melakukan penelitiannya di Amerika Latin, tidak mampu menjelaskan fenomena terbentuknya aktor informal di perkotaan sebagai wujud perlawanan mereka terhadap kebijakan pemerintah setempat yang dinilai belum memihak para pelaku ekonomi, juga belum dapat menjelaskan bagaimana fenomena para pelaku ekonomi tersebut dapat menjalin hubungan-hubungan antara pelaku-pelaku yang ikut terlibat dalam mengakses ruang publik sebagai tempat berdagang mereka. Penelitian Soto tersebut hanya dapat menjelaskan, bahwa orang-orang di pedesaan banyak melakukan migrasi ke perkotaan, akibat musim *paceklik* yang berkepanjangan, banjir, mundurnya pertanian, dan padatnya jumlah penduduk.

Murray (1994) dalam penelitiannya mengenai pedagang jalanan dan pelacur di Jakarta, mampu menjelaskan akibat dari kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan aspek sosial dan budaya bagi masyarakat kota Jakarta. Menurut Murray melalui penelitiannya, menyimpulkan bahwa akibat pembangunan fisik kota yang kurang memperhatikan aspek-aspek tersebut dan kurang memperhatikan aspek pemerataan mengakibatkan terjadi urbanisasi secara besar-besarnya. Urbanisasi yang berlebihan itulah yang mengakibatkan banyak diantara mereka yang memilih menjadi pedagang jalanan. Berdasarkan penelitiannya tersebut kurang memperhatikan bagaimana para pedagang jalanan

tersebut melakukan cara-cara untuk dapat tetap diijinkan untuk berdagang di kawasan yang dinyatakan dilarang oleh pemerintah setempat. Juga Murray sama sekali tidak menjelaskan bagaimana para pelaku sektor ekonomi informal (khusus pedagang jalanan) tersebut membangun hubungan-hubungan kekuasaan dengan para aktor lainnya yang berusaha ikut mendukung keberadaannya dalam rangka mengakses ruang publik, sehingga sebagai wujud perlawanan terhadap petugas penertiban yang sering dilakukan oleh pemerintah kota.

Hampir mirip dengan hasil penelitian Murray, peneliti sosial lainnya adalah Jellinek (1959) telah melakukan studi mengenai perubahan sosial di sebuah kampung di Jakarta, dan menyimpulkan bahwa akibat urbanisasi yang sudah tidak dapat terbendung, bahwa seluruh perkampungan di Jakarta dipenuhi oleh kaum urban. Meskipun Jellinek mampu menjelaskan keberhasilan kaum urban dan diantara mereka ada yang menjadi orang sukses, bahkan dapat melebihi masyarakat asli Jakarta. Tetapi Jellinek tidak mampu menjelaskan tentang bagaimana kaum urban melakukan strategi mempertahankan hidupnya akibat adanya peraturan daerah yang belum dapat mengakomodir kepentingan para urban, seperti seringkali menghadapi gusuran dan pembongkaran paksa, penertiban, pungutan liar (*pungli*), yang seolah mereka ini menjadi *sapi perah* oleh para oknum tertentu di lapangan.

Kemudian terdapat pola dalam kajian Antropologi tentang transformasi sektor informal dan perkotaan yang telah dilakukan oleh Geertz (1989: 53) yang mengambil lokasi penelitian di dua kota, yakni Mojokuto (di daerah Pare, Jawa Timur) dan Tabanan (Bali). Berdasarkan hasil penelitiannya mendapatkan simpulan, bahwa sekelompok pengusaha toko dan pelaku ekonomi kecil-kecilan yang timbul dari kelas bawah yang direpresentasikan melalui pasar tradisional dalam konteks 'Bazar Ekonomi' berusaha mendapatkan status yang lebih baik di masyarakat dengan jalan mencari kekayaan secara sistematis dan rasional. Mereka ini tidak mempunyai kekuasaan, modal yang besar, atau kemampuan untuk membentuk pranata-pranata ekonomi efisien, tetapi mereka hanya memiliki semangat kerja yang besar dalam wadah pengusaha tanpa perusahaan.

Berdasarkan temuan ini, dapat disebutkan bahwa Geertz tersebut merupakan laporan yang cukup efektif hingga saat ini. Namun, penelitian ini belum melihat berbagai kekecewaan yang sering dirasakan oleh para pelaku sektor informal terhadap kebijakan pemerintah setempat yang dirasakan tidak memihaknya. Demikian juga, bahwa penelitian ini tidak membahas berbagai perlawanan, negosiasi dan akomodasi yang sering dilakukan oleh pelaku sektor informal serta bagaimana hubungan-hubungan yang mereka bentuk dalam memberdayakan kekuasaan dalam konteks penggunaan ruang publik sebagai tempat mereka sehari-hari dalam aktivitas berdagang.

Dalam kaitannya dengan pasar tradisional, Wignjosoebroto, dkk., (1993) telah mampu menjelaskan tentang hubungan sosial yang terjadi di pasar, tidak semata-mata sebuah kegiatan ekonomi (*on economic event*), tetapi juga sebagai suatu gejala sosial yang sekaligus sebagai suatu gejala kebudayaan. Dengan demikian, Wignjosoebroto telah berhasil mengungkap strategi hubungan yang dibangun oleh para pelaku sektor informal dengan pelaku-pelaku lainnya dalam memperoleh pengakuan hak atas keberadaannya di jalur 'terlarang'. Strategi-strategi yang digunakan cukup membuat 'pusing' pemerintah setempat dalam melaksanakan kebijakan publik secara tegas, dan selalu dihadapkan pada persoalan kemanusiaan dalam menghadapi ketidak-tertiban mereka, sehingga seolah tidak ada jalan keluar.

Penelitian lain yang menyangkut kehidupan PKL seperti yang dilakukan Mustofa (1998). Dari hasil penelitiannya, berhasil mendapatkan simpulan bahwa dalam aktivitas PKL yang menunjukkan adanya peningkatan taraf hidup mereka memungkinkan terjadi mobilitas vertikal, sehingga kegiatan sektor ini bukan lagi merupakan aktivitas untuk mempertahankan hidup semata. Hasil temuan Mustofa tersebut, telah mampu mengungkap adanya stratifikasi sosial di kalangan pedagang kakilima. Tetapi dalam kajiannya belum menjelaskan tentang berbagai kekecewaan di kalangan PKL yang seringkali menimbulkan perlawanan yang bersifat sporadis akibat dari dukungan para pelaku lainnya yang sengaja memanfaatkan situasi di belakang layar.

Demikian juga, studi dari Evers (1993) yang mengkaji mengenai transformasi sektor informal merupakan konsekuensi dari kebijakan sosial dan politik di Indonesia. Evers berhasil mengungkap terjadinya mobilitas dari sektor informal ke sektor formal cenderung meningkat, dan hal ini mengindikasikan peningkatan dinamika sektor informal dan transformasi masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, penelitian ini tidak cukup jeli menjelaskan adanya berbagai relasi yang diciptakan oleh pelaku-pelaku sektor informal dan di luar itu yang ikut ambil bagian dalam menghadapi ancaman pengusuran, penertiban petugas penertiban dalam konteks penguasaan ruang publik sebagai tempat untuk berdagang. Dengan demikian pihak pemerintah kota sering dihadapkan pada situasi yang serba salah dalam menanganinnya.

Studi yang menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya resistensi dari rakyat yang mempunyai ekonomi lemah, antara lain seperti yang pernah dilakukan oleh James Scott (1993) dalam tema: 'Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari dari Kaum Petani' telah mampu menyimpulkan bahwa petani melakukan perlawanan terhadap tuan tanah, karena mereka terpaksa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan. Namun, Scott tidak menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat adanya resistensi, negosiasi dan akomodasi dalam hubungan-hubungan kekuasaan yang mungkin dapat dibangun oleh para petani untuk mempertahankan hidupnya belum tersentuh. Meskipun demikian, Scott mampu menjelaskan berbagai bentuk resistensi tersembunyi yang dilakukan oleh petani terhadap para tuan tanah.

Hasil kajian Wolf (1969) yang berhasil menjelaskan mengenai gerakan revolusi ner kaum petani di enam negara, yakni Vietnam, Aljazair, Rusia, Cina, Kuba, dan Meksiko. Berdasarkan kajiannya tersebut mampu menghasilkan tesis, bahwa petani tradisional yang memiliki budaya subsistensi yang kuat menganggap perubahan yang terjadi sebagai akibat penetrasi kapitalis di daerah pedesaan sangat membahayakan kelangsungan hidup, adat istiadat, dan hak-hak sosial tradisional yang mereka memiliki. Oleh karena itu, petani mengambil sikapdefensi terhadap perubahan yang terjadi. Meskipun demikian, penelitian ini belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai faktor-faktor apakah yang melatar-

belakangi timbulnya gerakan revolusioner tersebut?, dan seperti apakah bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan mereka dalam melakukan gerakan tersebut?, serta bagaimanakah hubungan kekuasaan antara kaum petani dengan tuan-tuan tanah setempat yang rentan terhadap budaya resistensi di kalangan kaum petani tersebut?, belum dapat diungkapkan.

Hasil penelitian Popkin (1979) berhasil membahas mengenai rasionalitas kaum petani dalam konteks pemasaran. Berdasarkan temuannya Popkin menyimpulkan, bahwa petani melakukan resistensi karena mereka tidak mempunyai akses terhadap pasar. Dan resistensi petani ini sebagai bentuk tindakan rasional yang sangat memperhitungkan untung rugi. Tetapi, Popkin tidak menjelaskan adanya bentuk-bentuk kekecewaan yang melatar-belakangi resistensi tersebut, berbagai hubungan yang dibangun oleh para petani dengan pelaku-pelaku yang kemungkinan terlibat dalam menghadapi kebijakan pemerintah kota yang dianggap masih bersifat sepihak.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di atas dapat dipahami, bahwa studi yang pernah dilakukan lebih banyak menjelaskan sebuah resistensi pada masyarakat ekonomi lemah dalam upaya mempertahankan eksistensi mereka dan akibat dari kebijakan pemerintah yang tidak pernah memihak. Tetapi, berbagai studi yang pernah dilakukan itu tidak banyak menjelaskan bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan oleh masyarakat yang tergolong marjinal yang diwakili oleh pelaku sektor informal dalam menghadapi kebijakan pemerintah setempat. Berbagai hubungan yang dilakukan oleh pelaku sektor informal yang sehari-hari menggelar dagangannya di jalur-jalur 'terlarang' dalam konteks penguasaan ruang publik. Hubungan-hubungan tersebut, dilakukan dengan melibatkan Preman dan Aparat setempat telah mampu mengimbangi kebijakan selama ini. Hubungan-hubungan antara PKL, Preman dan Aparat dalam konteks penguasaan ruang publik itu yang menjadi objek kajian ini.

1.6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada proses daripada hasil, serta cenderung melibatkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan kepercayaan antara peneliti dengan informan. Artinya, pendekatan ini melibatkan saya sebagai peneliti hendak menempatkan informan seperti keluarga dan tidak hanya sebatas menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Tetapi, juga memberi informasi yang terkait dengan masalah penelitian tanpa harus ditanyakan⁷.

Kegiatan untuk memilih calon informan ini, saya lakukan dengan mendekati diri dengan para pelaku terutama yang ikut bekerja di belakang para PKL, selain pedagang itu sendiri. Proses pemilihan informan tersebut, seringkali tidak mudah dilakukan karena memakan waktu. Oleh karena itu, saya harus berinteraksi dan membangun *raport* terlebih dahulu dengan mereka di lokasi penelitian. Informan yang saya pilih di tempat dimana mereka ‘mangkal’ dan melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan aktivitasnya sebagai pedagang.

Untuk menentukan informan pada awalnya bersifat eksploratif yaitu dengan cara ‘*snowball*’, dimaksudkan untuk menelusuri sumber informan yang dimintai keterangan secara mendalam. Kemudian, sumber informan saya pilih secara hati-hati sesuai tujuan penelitian. Tempat dan peristiwa yang terkait dengan kegiatan informan diamati sesuai *setting* penelitian, termasuk tempat-tempat yang berkaitan dengan kehidupan informan tidak luput dari pengamatan saya. Calon informan yang didekati yaitu mereka yang langsung terlibat dalam suatu kegiatan yang sedang diteliti, yaitu para pelaku yang melakukan kontak dengan para pelaku. Kriteria ini saya anggap perlu, karena calon informan nantinya diharapkan dapat menjelaskan gejala yang terjadi saat penelitian sedang berlangsung. Berbagai informasi yang saya peroleh dari informan tersebut saya konfirmasi

⁷ Secara metodologis dapat memberikan arahan, bahwa pengertian informan berbeda dengan responden. Meskipun keduanya sama-sama memberi informasi pada peneliti. Tetapi, pengertian responden lebih terbatas pada pemberian informasi karena permintaan peneliti. Sedangkan informan lebih cenderung membangun hubungan dengan peneliti, karena si peneliti membutuhkan informasi. Dengan melibatkan hubungan antara peneliti dengan informan, maka akan terlihat gambaran subjek penelitian dalam rangka membangun hidup, pengalaman, dan struktur dunianya secara masuk akal (Creswell, 1994).

dengan para pelaku lainnya dengan cara *triangulasi* data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, saya melakukan sejumlah data dengan mereview beberapa rujukan melalui referensi-referensi, sebagai berikut :

- Tahap *review* Literatur

Pada tahap ini saya lakukan dengan mencari referensi melalui surat kabar, jurnal, makalah seminar atau loka karya, buku teks dan sejumlah laporan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Di samping itu, dokumen-dokumen yang berisi tentang konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan dengan fenomena hubungan-hubungan kekuasaan di kalangan PKL.

- Tahap Penelusuran Internet (*internet browsing*)

Tahap ini saya lakukan untuk melengkapi data melalui internet dengan mengunjungi *website* yang berkaitan dengan konsep-konsep dasar, artikel atau hasil penelitian sesuai dengan masalah penelitian dalam disertasi ini. Penelusuran internet ini sangat membantu saya, karena dapat memperoleh informasi untuk dijadikan arahan dalam menyusun kerangka pemikiran awal.

- Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam yang saya maksudkan adalah suatu proses tanya – jawab yang dilakukan secara mendalam dan detail antara penanya dengan nara sumber (Mudrajat, 2003). Proses ini dapat saya lakukan secara terstruktur, yakni dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu, ataupun secara tidak terstruktur atau spontan sesuai dengan situasi yang ada. Pada awal pelaksanaannya ada beberapa halangan saat melakukan proses wawancara tersebut, antara lain : sulitnya melakukan pendekatan dengan informan, baik dari pihak PKL, petugas lapangan (anggota Satpol PP termasuk pimpinannya) untuk mencari informasi terkait dengan keberadaan PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat aktivitasnya sehari-hari. Sasaran informan yang berhasil diwawancara sebanyak tigapuluh orang

dengan pembagian 25 orang dari pihak PKL dan 5 orang dari pihak anggota Satpol PP.

Lama pengumpulan data selama ini dilakukan kurang lebih enam bulan terhitung mulai dari minggu terakhir Bulan Februari 2008 sampai dengan Bulan Juli 2008. Tetapi sebelumnya, sebelumnya sudah dilakukan penelitian pendahuluan selama tiga bulan mulai dari Bulan Nopember 2007 sampai dengan Bulan Januari 2008. Penelitian pendahuluan ini saya lakukan dengan maksud untuk mengetahui kondisi awal serta mengenal objek penelitian termasuk mengenal secara lebih dekat dengan calon informan. Disamping itu, saya juga melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pelaku di lapangan, seperti petugas Satpol PP, para PKL, beberapa pengurus anggota Paguyuban Pedagang Kaki-Lima setempat serta beberapa para preman yang sering melakukan 'pungutan liar', petugas kebersihan dan keamanan, dan beberapa aparat pemerintah, termasuk petugas Satpol PP.

Metode pengamatan yang saya gunakan untuk memperoleh data di lapangan adalah dengan cara pengamatan terlibat. Artinya, saya berusaha melibatkan diri dalam setiap kegiatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari para PKL yang berjualan di tempat-tempat yang dinyatakan terlarang. Disamping itu, saya melibatkan diri dengan kegiatan yang terkait dengan kebijakan, khususnya tentang pelaksanaan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memahami informasi yang berkembang baik di kalangan PKL maupun kalangan para pelaku lainnya yang mempunyai akses untuk bernegosiasi dengan pihak pelaku- pelaku dari petugas di lapangan. Semua hal yang terkait dengan informasi di atas, dicatat dalam bentuk catatan lapangan (*field work*).

Di samping pengamatan di lapangan, juga melakukan pendataan mengenai keberadaan PKL di Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika, dengan mencatat kelompok umur, sosial-ekonomi, dan asal suku. Pendataan (survei sederhana) tersebut saya lakukan untuk memperkuat data yang saya peroleh melalui

wawancara mendalam. Sebagian dari data tersebut di atas, merupakan informan-informan yang nanti saya wawancarai.

Seperti penelitian kualitatif lainnya, maka saya gunakan metode validasi data (uji keabsahan data) untuk melihat kesesuaian dari data yang telah diperoleh di lapangan.

Pertama, saya gunakan untuk menguji keabsahan data adalah dengan teknik *triangulasi*, dimaksudkan mendapatkan informasi mengenai perilaku informan (subjek utama penelitian) termasuk menanyakan kebenaran dari beberapa cerita subjek lainnya dengan orang terdekat subjek utama. Teknik ini saya juga lakukan terhadap teman dekat informan atau anggota keluarganya mengenai subjek pendukung, terhadap perilaku subjek utama. Di samping itu bertujuan untuk melihat sejauh mana kebenaran pernyataan subjek dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan tingkat kredibilitas sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kedua, dengan teknik *peer debriefing*, yaitu pembicaraan dengan kolega atau teman sejawat yakni kegiatan yang membahas dan membicarakan hasil penelitian dengan teman-teman sejawat saya. Hal ini saya maksudkan untuk memperoleh masukan-masukan berupa pandangan yang netral dan objektif, baik berupa saran maupun kritikan-kritikan, sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan dari hasil penelitian ini.

Ketiga, dengan penggunaan bahan referensi. Hal ini saya lakukan dengan menggunakan rekaman tape recorder (MP-3) untuk merekam hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian, seperti misalnya: merekam kejadian-kejadian saat dilakukan penertiban oleh petugas, pertemuan-pertemuan antara kedua belah pihak yang tentunya atas ijin para informan dan pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.

Keempat, dengan teknik *member check*. Ini saya lakukan dengan mengkonfirmasi hasil-hasil penelitian lainnya yang senada dengan informasi yang diperoleh untuk dinilai kebenaran dan keotentikannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Sebelum mendapatkan data melalui tahap-tahap tersebut di atas, maka saya menghubungi pihak pemerintah Kota Depok melalui Biro Hukum, kemudian diteruskan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, (disingkat Satpol PP) untuk mendapatkan ijin penelitian. Setelah saya dipertemukan oleh Kepala Satpol PP, lalu saya diberikan ijin untuk melakukan penelitian di sepanjang Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika. Sebelum diberi ijin saya diperkenalkan terlebih dahulu oleh sebagian personil yang bertugas di lapangan termasuk komandan Satpol PP, sehingga saya sedikit banyak mengenal mereka yang sering melakukan penertiban. Selama satu bulan saya melakukan pendekatan dan selalu datang ke kantor tempat mangkalnya petugas penertiban, dengan maksud agar saya diterima untuk nantinya dapat memperoleh informasi yang terkait dengan keberadaan PKL, minimal dapat berkomunikasi dengan mereka saat akan melakukan penertiban atau pada saat santai/ istirahat.

Selang waktu dua bulan berjalan saya merasa sudah dapat diterima oleh mereka, maka saya minta ijin pada kepala Satpol PP untuk ikut ambil bagian jika sewaktu-waktu ada penertiban. Atas ijinnya, saya diberi informasi saat melakukan penertiban yang ditujukan pada para pedagang yang berjualan di lokasi-lokasi terlarang di sepanjang Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika termasuk di dalam Terminal Terpadu Depok. Pada saat dilakukan penertiban, yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2007 saya ikut ambil bagian dengan pihak petugas Satpol PP untuk melakukan semua PKL yang *mangkal* di sepanjang tersebut. Berdasarkan informasi dari pihak kepala Satpol PP, bahwa mereka sudah diberitahu baik lewat surat maupun lewat selebaran kalau akan dilakukan penertiban dengan maksud agar tidak terjadi kesalah-pahaman dari mereka nantinya. Tapi saat dilakukan penertiban banyak PKL tersebut belum menerima informasi tersebut. Dan penertiban yang dilakukan saat itu bersifat kekeluargaan dan banyak dari pihak para PKL yang menerima. Namun setelah penertiban sampai di depan Terminal Terpadu Depok, banyak dari pihak PKL yang tidak menerima atas penertiban tersebut.

Melakukan pengamatan secara langsung dan berkenalan dengan pihak PKL sesuai *setting* penelitian ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi peneliti. Berjalan menyelusuri sepanjang jalan dengan melihat-lihat bagaimana aktivitas para pedagang dan kejadian-kejadian yang terkait dengan penertiban umum yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Awalnya mereka ragu-ragu dan penuh curiga melihat saya. Mungkin dikepala mereka, ada orang yang baru kita lihat mungkin ini wartawan yang hendak mencari informasi. Setelah hari-hari berikutnya saya mulai hati-hati untuk mendekati mereka, dan cara berpakaian saya robah sesuai orang-orang umumnya (yaitu menggunakan kaos biasa) berganti – ganti setiap hari dengan kaos yang sedikit agak buram. Cara ini saya lakukan agar mereka tidak curiga, kalau saya sedang melakukan penelitian sehingga untuk menggali informasi dari mereka tidak mengalami kesulitan. Cara ini saya lakukan selama saya berada di lapangan saat menggali data.

Setelah mereka menerima kehadiran saya dan tidak curiga, maka saya mulai melakukan pendekatan dengan mereka terlebih dahulu saya menemui orang-orang yang berpengaruh bagi para pedagang, misalnya seperti Ketua Paguyuban Pedagang Kaki-Lima (yang dikenal dengan nama Pak De), beberapa preman yang sering *mangkal* dan beroperasi yang mengikuti aktivitas sehari-hari PKL. Selang beberapa saat, saya dikenalkan dengan sebagian pengurus paguyuban dan beberapa PKL yang termasuk dalam kepengurusan. Juga mereka para oknum petugas kebersihan dan oknum petugas keamanan tidak luput dari sasaran saya untuk dilakukan pendekatan. Saya dengan para oknum petugas kebersihan dan petugas keamanan, mulai menerima untuk diajak bicara sehingga saya merasa bahwa sudah dapat dilakukan wawancara secara mendalam.

Bersama para pedagang, saya mulai masuk untuk ikut ambil bagian yaitu ikut melayani dan membantu sebagai pedagang untuk melayani pembeli. Hal itu saya lakukan dengan beberapa PKL yang berjualan baik yang *mangkal* di sepanjang Jalan Margonda dan Jalan Dewi Sartika. Dengan hal tersebut, saya lebih dikenal dan lebih untuk mendengarkan pembicaraan mereka, tentang nasib mereka yang selalu menjadi objek para petugas Satpol PP untuk ditertibkan. Pembicaraan-

pembicaraan mereka penting untuk dijadikan informasi tentang keberadaan mereka selama ini.

Setelah beberapa minggu mereka telah menerima saya dan sudah merasa bagian dari mereka, kemudian saya melakukan pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan cara obrolan yang tidak resmi. Hal ini saya lakukan untuk menjaga jangan sampai mereka curiga. Di samping itu saya juga mencatat hal – hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka dalam bentuk catatan lapangan (*field note*). Informasi ini saya gunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana data tersebut mengalami kejenuhan, sehingga setiap hal yang menyangkut kehidupan dan keberadaan PKL tidak luput masuk dalam catatan lapangan tersebut. Di antara PKL yang ada di Jalan Margonda terutama yang mangkal pada sore dan malam hari banyak dari suku Jawa terutama dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga untuk melakukan pendekatan dengan mereka tidak mengalami kesulitan. Justru mereka ingin membantu untuk memberikan informasi sebagaimana adanya. Setelah beberapa minggu saya melakukan pendekatan dengan mereka terkesan seperti keluarga dan sudah terasa merupakan bagian dari mereka. Hal ini terbukti ketika saya membantu mereka yaitu dengan ikut melayani pembeli di tempat dagang mereka.